

BAB III

UPAYA TIONGKOK DALAM MEWUJUDKAN REUNIFIKASI DENGAN TAIWAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan pada masa kepemimpinan Xi Jinping sebagai pemimpin generasi kelima Republik Rakyat Tiongkok. Dari awal Xi memimpin, isu Taiwan telah menjadi hal yang serius bagi Tiongkok untuk diselesaikan karena isu ini sampai sekarang belum dapat diselesaikan. Menurut Tiongkok, Taiwan merupakan wilayah kedaulatannya namun Taiwan tidak mengakui hal ini sehingga Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkan dan berusaha untuk melakukan tindakan separatistis. Oleh karena itu Tiongkok dibawah kepemimpinan Xi kemudian mengusung reunifikasi diantara keduanya.

Reunifikasi yang dimaksud adalah kembalinya Taiwan ke Tiongkok dengan mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai negaranya dan Taiwan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok. Reunifikasi ini telah menjadi hal yang sangat mendesak bagi Tiongkok agar Taiwan dapat kembali di bawah kedali Tiongkok secara penuh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan terciptanya penyatuan kembali atau reunifikasi antara Tiongkok dan Taiwan, Xi melakukan upaya-upaya secara bertahap yang dimulai sejak ia berkuasa pada tahun 2012 hingga sekarang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Xi diantaranya yaitu mempererat kerjasama ekonomi dengan Taiwan, menegaskan kembali konsensus 1992, menawarkan proposal Satu Negara Dua Sistem (*One Country Two Systems*), dan yang terakhir adalah membuat ancaman militer terhadap Taiwan.

A. Mempererat Kerjasama Ekonomi dengan Taiwan

Tiongkok dan Taiwan telah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi untuk pertama kalinya ketika Republik Rakyat Tiongkok dipimpin oleh Deng Xiaoping (pemimpin Tiongkok generasi kedua setelah Mao Zedong) yang ditandai dengan adanya Reformasi dan Kebijakan Terbuka yang diterapkan oleh Tiongkok pada akhir tahun 1970-an. Melalui Reformasi dan Kebijakan Terbuka ini, Tiongkok mengusulkan untuk membangun tiga tautan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan yaitu perdagangan langsung, pos, dan hubungan transportasi.

Hal tersebut telah memberikan kesempatan bagi Taiwan untuk melakukan investasi di Tiongkok meskipun hubungan keduanya masih diselimuti oleh pertikaian mengenai status Taiwan yang sudah ada sejak lama ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) kabur dan mendirikan pemerintahan nasionalis (Republik Tiongkok) di Taiwan pada tahun 1949. Dengan investasi yang dilakukan oleh Taiwan tersebut telah membuat hubungan ekonomi lintas selat menjadi berkembang (Albert, 2019).

Sejak Xi Jinping pertama kali menjabat sebagai pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 2012, Xi memiliki tujuan untuk menyatukan kembali wilayah Taiwan dengan Tiongkok. Sehingga, Xi melakukan upaya-upaya yang sebisa mungkin dapat menyatukan Taiwan secara damai yang dikenal sebagai *peaceful reunification*. Adanya hubungan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dengan Taiwan yang sudah ada sejak kepemimpinan Deng, membuat Xi mengambil langkah untuk memanfaatkan hubungan tersebut dengan meningkatkan kerjasama ekonomi diantara keduanya

yang diharapkan dapat mendorong Taiwan lebih dekat dengan reunifikasi.

Pada awal kepemimpinan Xi, Tiongkok berfokus pada mengembangkan ikatan ekonomi dengan Taiwan sehingga hal tersebut telah membuat adanya ikatan ekonomi yang kuat antara keduanya melalui perdagangan dan investasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan volume perdagangan antara keduanya yang mencapai senilai \$124 miliar pada tahun 2013 (Cisse, 2015). Selain itu, Tiongkok juga memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan besar Taiwan untuk membuka cabang dan beroperasi di wilayah Tiongkok dan telah memberikan dampak besar pada rantai pasokan global Taiwan. Xi juga memberikan izin kepada orang-orang Taiwan mencari pekerjaan di wilayah Tiongkok.

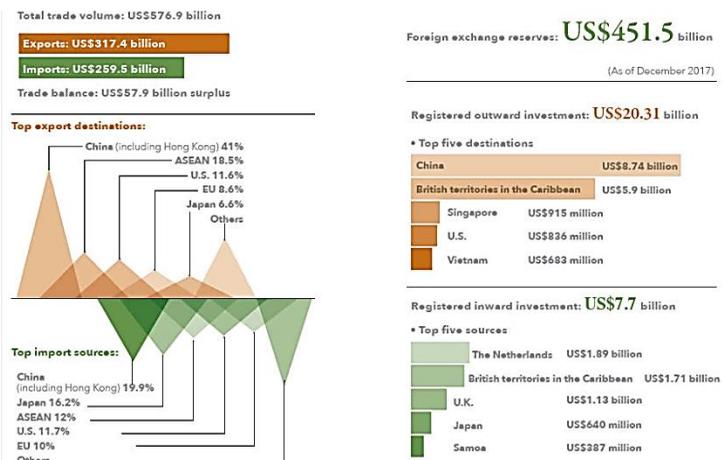
Grafik 3.1.
Peningkatan Wisatawan Tiongkok ke Taiwan



Sumber: (Horwitz, 2016)

Melalui kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan telah memberikan keuntungan dengan jumlah besar terhadap pariwisata Taiwan. Hal ini dikarenakan Xi memberikan izin kepada warganya untuk melakukan perjalanan wisata ke Taiwan. Pemberlakuan izin kepada warga Tiongkok berkunjung ke Taiwan sebenarnya sudah ada sejak bulan Juni tahun 2011 ketika Tiongkok masih dipimpin oleh Hu Jintao dan diteruskan oleh Xi. Warga Tiongkok yang melakukan perjalanan wisata ke Taiwan ini telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan Taiwan dari pariwisatanya karena terjadi lonjakan pengunjung yang cukup besar di Taiwan. Berdasarkan pada gambar 3.1. menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun terhadap warga Tiongkok yang melakukan perjalanan wisata ke Taiwan sejak Xi memimpin Tiongkok yaitu dari tahun 2012 hingga 2015. Bahkan, diketahui bahwa hampir 50% dari wisatawan di Taiwan berasal dari Tiongkok (Horwitz, 2016).

Grafik 3.2.
Profil Perdagangan dan Investasi Taiwan



Sumber: (Taiwan Government, 2017)

Pada tahun 2014, Tiongkok merupakan pasar besar bagi Taiwan karena telah menyumbang sebesar 39.6% dari total keseluruhan. Masih pada tahun yang sama, jumlah ekspor ke Tiongkok mencapai \$82.1 juta yang sekaligus menjadikan Tiongkok sebagai ekspor tertinggi Taiwan (Horwitz, 2016). Bahkan, posisi Tiongkok sebagai ekspor terbesar bagi Taiwan terus bertahan hingga tahun-tahun berikutnya, seperti yang terlihat pada gambar 3.2. dimana menunjukkan Tiongkok masih menjadi ekspor terbesar Taiwan sebesar 40% dari total ekspor keseluruhan. Tiongkok juga merupakan sumber impor terbesar Taiwan dengan total 19.9%, serta Tiongkok merupakan tempat investasi terbesar Taiwan yang mencapai \$8.74 miliar (Taiwan Government, 2017).

Pada tanggal 7 November 2015, untuk pertama kalinya Tiongkok dan Taiwan bertemu sejak keduanya berpisah 70 tahun lamanya yang diadakan di Singapura. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pemimpin dari kedua pihak yaitu Xi Jinping sebagai presiden Republik Rakyat Tiongkok dan Ma Yiong-Jeou sebagai presiden Taiwan. Pertemuan ini tidak membahas mengenai perdamaian menuju reunifikasi, melainkan membahas mengenai peningkatan kerjasama ekonomi yang akan memperdalam hubungan ekonomi diantara keduanya. Meskipun tidak adanya pembahasan tentang reunifikasi, pertemuan tersebut telah berhasil menurunkan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan yang sejak lama selalu diselimuti ketegangan (Cisse, 2015).

Hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan dari tahun ke tahun semakin erat dan meningkat. Hal ini terbukti pada tahun 2018 Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Taiwan yang dihitung hampir 30 % dari total perdagangan Taiwan dan sebesar 18,6 % dari impor Taiwan. Bahkan, perdagangan antara keduanya telah mencapai sekitar \$150.5 miliar. Jumlah ini telah membuktikan adanya peningkatan yang begitu signifikan

sejak tahun 1999 yang masih berjumlah \$35 miliar. Sehingga, hal ini telah memberikan dampak baik terhadap pendapat Taiwan yang meningkat sebanyak 2,6 % (Albert, 2019).

Dengan adanya hubungan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dengan Taiwan telah membuat Taiwan begitu terikat dengan Negeri Tirai Bambu ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari perekonomian Taiwan menunjukkan pengaruh besar Tiongkok yang bertindak sebagai pasar bagi Taiwan maupun sebaliknya telah mendatangkan keuntungan dalam jumlah besar bagi Pulau Formosa tersebut. Kerjasama ini bukan hanya semata-mata karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi, tetapi sebagai upaya Xi Jinping untuk membuat Taiwan dapat kembali menyatu dan mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai negaranya seperti apa yang diimpikan oleh Xi dan orang-orang Tiongkok sendiri.

Pengaruh besar peran Tiongkok terhadap perekonomian Taiwan membuat Taiwan menjadi ketergantungan terhadap Tiongkok sehingga akan mendorong hubungan keduanya semakin erat. Hal ini yang kemudian diharapkan oleh Xi bahwa dengan adanya hubungan yang erat dan ketergantungan perekonomian Taiwan terhadap Tiongkok akan membuat Taiwan bersedia untuk bekerjasama dengan Tiongkok untuk mewujudkan reunifikasi diantara keduanya (Horwitz, 2016).

B. Menegaskan Kembali Konsensus 1992

Xi Jinping dalam langkah mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan, Xi menegaskan kembali Konsensus 1992 terhadap Taiwan yang mengarah kepada *One China Principle* atau dalam bahasa Mandarin yaitu 一个中国原则 (pinyin: *Yī Gè Zhōngguó Yuán Zé*). Istilah

One China atau 一个中国 (pinyin: *Yī Gè Zhōngguó*) sendiri hadir ketika adanya normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada awal tahun 1970-an melalui sebuah perjanjian yang dikenal dengan *Shanghai Communiqué*. Dalam perjanjian ini secara tegas menjelaskan mengenai *One China* yang mengarah kepada Republik Rakyat Tiongkok sebagai pemegang keabsahan tertinggi di wilayah Tiongkok baik Daratan Tiongkok maupun Taiwan. Ada pun bunyi dari *Shanghai Communiqué* yaitu:

“The government of the People’s Republic of China is the sole legal government of China; Taiwan is a province of China which has long been returned to the motherland; the liberation of Taiwan is China’s internal affair which no other country has the right to interfere; and U.S. forces and military installations must be withdrawn from Taiwan.” (Lijun, 2001).

Konsensus 1992 merupakan sebuah konsensus yang dihasilkan pada saat Deng Xiaoping masih menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1992. Konsensus ini hadir sebagai hasil dari perundingan lintas-selat yang diadakan oleh Taiwan dan Tiongkok secara tidak resmi. Perundingan tersebut dihadiri oleh badan perwakilan dari masing-masing pihak yang dibentuk ketika adanya perkembangan hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan sehingga keduanya memutuskan untuk membangun sebuah badan untuk menjembatani hubungan antar satu sama lain atau yang dikenal sebagai hubungan Lintas-Selat. Taiwan membentuk organisasi *Straits Exchange Foundation* (SEF) pada tanggal 9 Maret 1991 dan Tiongkok yang melihat hal ini sebagai peluang untuk reunifikasi kemudian juga membentuk *Association for Relations*

Across the Taiwan Straits (ARATS) pada tanggal 1 Desember 1991 (Cohe, 2018).

Berawal dari adanya perbedaan pendapat antara Tiongkok dan Taiwan terhadap makna *One China*, sehingga pada bulan Maret 1992 keduanya mengadakan perundingan yang diwakili oleh SEF dan ARATS di Hong Kong. Hasil dari perundingan tersebut menghasilkan konsensus 1992 dimana mengarah kepada definisi *One China* yang berbunyi “Hanya ada satu Tiongkok di dunia ini; dan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok”. Meskipun sudah secara jelas *One China* yang dimaksud adalah wilayah Tiongkok meliputi Tiongkok Daratan dan Taiwan, namun baik Tiongkok maupun Taiwan memiliki interpretasi berbeda akan makna tersebut.

Republik Rakyat Tiongkok mengartikan *One China* sebagai “Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan satu-satunya pemerintah Tiongkok yang sah dan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok”. Hal ini tentu secara jelas menegaskan kekuasaan Tiongkok terhadap wilayah Taiwan. Sedangkan, Taiwan memaknai *One China* berbeda dari interpretasi Tiongkok, yaitu “Republik Tiongkok (dibangun pada tahun 1912 oleh Sun Yat Sen) yang saat ini memerintah di Taiwan memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah Tiongkok” (Lijun, 2001).

Penafsiran Taiwan terhadap *One China* ini secara jelas memberikan penolakan terhadap apa yang dimaknai oleh Tiongkok itu sendiri. Meskipun demikian, Tiongkok membantah hal tersebut dengan tegas akan adanya interpretasi bebas dari prinsip *One China*. Bahkan, ARATS sendiri telah memperjelas posisi Tiongkok terhadap Taiwan yang diwakili SEF mengenai prinsip *One China* yang harus dipatuhi dan dipegang teguh. Sehingga pada tanggal 16 November 1992, ARATS yang mewakili Tiongkok juga menegaskan secara verbal

mengenai prinsip *One China* yaitu kedua sisi Selat Taiwan, yaitu Tiongkok dan Taiwan, mematuhi prinsip *One China*, mencari reunifikasi nasional, tetapi konten politik dari *One China* tidak akan dimasukkan dalam pembicaraan. Hal ini menekankan mengenai larangan terhadap tidak adanya pembahasan apapun mengenai konten politik selama prinsip ini masih ada (Lijun, 2001).

Melalui konsensus 1992 yang mengarah kepada prinsip *One China*, Xi Jinping berupaya untuk membuat Taiwan kembali kepada Tiongkok. Xi sendiri mengatakan bahwa “*it’s a legal fact that both sides of the Strait belong to one China, and cannot be changed by anyone or any force*” (Hwai, 2019). Prinsip *One China* digunakan oleh Xi untuk menegaskan hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan dimana merupakan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Apa pun pembahasan yang melibatkan Taiwan harus berdasarkan pada prinsip *One China* untuk menunjukkan bahwa Taiwan merupakan daerah kekuasaan Tiongkok (Lijun, 2001).

Melalui prinsip *One China*, Xi kemudian juga menerapkannya dalam politik luar negeri Tiongkok yang menetapkan bahwa setiap negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok, maka mereka harus mengakui prinsip *One China* yang mengakui Taiwan sebagai bagian dari daerah kekuasaan Tiongkok. Sehingga, negara-negara tersebut tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya sekaligus, mereka harus memilih antara Tiongkok atau Taiwan. Ketetapan ini dikenal sebagai *One China Policy* atau dalam bahasa Mandarin yaitu 一个中国政策 (pinyin: *Yī Gè Zhōngguó Zhèng Zè*) yang juga pernah diberlakukan oleh pemimpin-pemimpin Tiongkok sebelumnya bahkan sejak Mao Zedong berkuasa ketika adanya normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat (Dittmer, 2017).

One China Policy digunakan oleh Xi untuk membatasi dan menghalangi aktivitas luar negeri Taiwan yang secara tidak langsung berusaha mengisolasi Taiwan dari dunia internasional. dengan *One China Policy*, Xi berusaha untuk membuat Taiwan tidak mendapatkan dukungan dari negara lain karena mereka akan lebih memilih menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok yang bagi Xi lebih memiliki *power* dibandingkan Taiwan. Sehingga, Xi Jinping menegaskan bahwa prinsip *One China* harus dipertahankan karena hal ini mencegah Taiwan yang berusaha untuk merdeka dan mendorong Taiwan menuju reunifikasi dengan Tiongkok. Xi Jinping mengatakan bahwa penyatuan kembali merupakan kebutuhan mendesak dan tidak dapat dihindarkan karena hal ini merupakan kepentingan nasional yang lebih besar dan diinginkan oleh semua orang di Tiongkok. Bahkan, kekuatan besar sekali pun tidak dapat menghentikannya (Kontan, 2019).

C. Proposal Satu Negara Dua Sistem

Kebijakan “Satu Negara Dua Sistem” (*One Country Two System*) atau dalam bahasa Mandarin yaitu 一国两制 (pinyin: Yī Guó Liǎng Zhì) pertama kali dirumuskan oleh Deng Xiaoping yang diumumkan secara resmi pada tanggal 22 Februari 1984. Deng membuat kebijakan ini dengan terinspirasi dari proposal reunifikasi yang dibuat oleh Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai pada tahun 1960 terhadap Taiwan yaitu *Yi Gang Si Mu* (Satu Prinsip Empat Poin). Isi dari proposal ini yaitu memberikan hak istimewa kepada Taiwan untuk mengelola pengaturan pemerintahan lokal dan militernya kecuali hak diplomatik, Tiongkok juga akan memberikan dukungan keuangan kepada Taiwan, reformasi sosial di Taiwan akan dimulai segera ketika kondisinya sudah matang, dan menyerukan kepada setiap pihak untuk

menahan diri dari perilaku berbahaya bagi kesatuan pihak lain (Lijun, 2001).

“Satu Negara Dua Sistem” merupakan sebuah kebijakan politik yang memberikan penawaran terhadap wilayah-wilayah Tiongkok yang terpisah untuk bergabung dengan Tiongkok. Wilayah tersebut akan dijadikan sebagai *Special Administrative Region* (Daerah Administrasi Khusus) dengan mendapatkan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh wilayah Tiongkok lainnya. Keistimewaan yang dimaksud adalah mereka diperbolehkan untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri, menerapkan ideologi yang mereka anut, mengelola sistem sosial dan gaya hidup ekonomi secara independen, dan hak pribadi dari wilayah tersebut juga akan dilindungi sehingga hal ini akan menjamin kebebasan bagi wilayahnya. Meskipun wilayah ini mendapatkan hak keistimewaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mereka tetap harus menjadikan Republik Rakyat Tiongkok sebagai pusatnya. Dalam artian, wilayah tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain (Faust, 2005).

Kebijakan “Satu Negara Dua Sistem” hadir sebagai bentuk dari *peaceful reunification* untuk menyatukan wilayah-wilayah Tiongkok yang belum bersatu dengan Tiongkok saat itu yaitu Hongkong, Macau, dan Taiwan. Kebijakan ini sebelum diumumkan secara resmi oleh Deng Xiaoping pada tahun 1984, telah tercantum dalam Pasal 31 Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok Tahun 1982 tentang Daerah Administratif Khusus yang berbunyi: “Negara dapat membentuk daerah administrasi khusus jika diperlukan. Sistem yang akan digunakan di daerah administrasi khusus harus disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional mengingat kondisi khusus.” (World Intellectual Property Organization, 2018). Pasal ini memberikan dasar konstitusional untuk membentuk

wilayah administrative khusus di daerah-daerah tertentu yang memperbolehkan mereka untuk mengadopsi sistem sosial dan kebijakan berbeda dari Republik Rakyat Tiongkok.

Kebijakan “Satu Negara Dua Sistem” ini kemudian digunakan oleh Xi Jinping untuk mewujudkan reunifikasi antara Tiongkok dan Taiwan yang akan membuat Taiwan dapat kembali ke bawah kekuasaan Tiongkok. Menurut Xi, bersatunya Tiongkok dengan Taiwan dibawah “Satu Negara Dua Sistem” ini akan menciptakan perdamaian di kawasan Selat Taiwan karena kebijakan ini akan mempertimbangkan kepentingan dari seluruh bangsa Tiongkok termasuk Taiwan serta akan memenuhi kebutuhan dari masing-masing pihak dimana Tiongkok yang menginginkan Taiwan kembali kepadanya dan Taiwan sendiri tetap bisa mempertahankan sistem pemerintahannya sendiri. Reunifikasi dibawah “Satu Negara Dua Sistem” merupakan cara terbaik untuk menjembatani kesenjangan politik Lintas Selat sehingga ketegangan diantara keduanya yang sudah ada sejak lama akan menghilang (Chung, 2014).

Xi pertama kali menghidupkan kembali gagasan reunifikasi Tiongkok dan Taiwan di bawah formula “Satu Negara Dua Sistem” pada tahun 2014 ketika bertemu dengan delegasi Taiwan yang mengunjungi kelompok-kelompok pro-reunifikasi. Xi mengatakan bahwa pemisahan diri yang berusaha dilakukan oleh Taiwan tidak dapat ditoleransi karena akan merusak kedaulatan nasional, integritas wilayah, dan perdamaian serta stabilitas Lintas Selat. Untuk itu, Taiwan harus bekerjasama dengan Tiongkok untuk mengekang langkah-langkah yang menghambat bagi impian penyatuan keduanya. Menurut Xi, formula “Satu Negara Dua Sistem” merupakan pedoman dasar *peaceful Reunification* yang akan menyelesaikan konfrontasi politik antara Tiongkok dan Taiwan dan

mewujudkan reunifikasi keduanya (The Economic Times, 2016).

Hal ini dikarenakan di dalam formula ini akan menjadikan Taiwan sebagai Daerah Administratif Khusus di bawah naungan Republik Rakyat Tiongkok dan menghapus Republik Tiongkok yang dipertahankan Taiwan, kehidupan ekonomi dan sosial Taiwan akan tetap dipertahankan seperti sebelumnya, serta institusi Taiwan akan ditransformasikan menjadi badan-badan sub-nasional. Melalui “Satu Negara Dua Sistem” ini, Tiongkok akan menyambut Taiwan dengan senang hati dan memperlakukan mereka dengan adil dan tanpa diskriminasi. Kebijakan “Satu Negara Dua Sistem” akan mempertimbangkan kondisi aktual dari Taiwan, mempertimbangkan saran dari kedua belah pihak, dan sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan Taiwan (The Economic Times, 2016).

Pada tanggal 2 Januari 2019, pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok generasi kelima yaitu Xi Jinping memberikan pidato kenegaraan di Istana Kepresidenan Republik Rakyat Tiongkok. Dalam pidato tersebut, ia mengemukakan kebijakan penyatuan Tiongkok dengan Taiwan. Pembahasan mengenai reunifikasi dalam pidato Xi tersebut bertujuan untuk menandai adanya peringatan 40 tahun pernyataan yang dibuat Tiongkok terhadap Taiwan pada tahun baru 1979 silam dimana Tiongkok menyebutkan bahwa reunifikasi damai merupakan cara terbaik untuk mengakhiri konflik antara keduanya yang sudah ada sejak lama. Terdapat delapan hal penting yang ia kemukakan, yaitu:

1. Xi memasukkan masalah khusus mengenai reunifikasi Tiongkok dan Taiwan ke dalam *signature theme* untuk masa jabatannya yang sekarang terbuka sebagai pemimpin Tiongkok;

2. Xi mengemukakan versi baru dari konsensus 1992 yaitu kedua sisi selat baik Tiongkok dan Taiwan merupakan milik *One China* dan akan bekerjasama untuk mencari penyatuan nasional;
3. Sistem yang digunakan oleh Taiwan saat ini akan dipertahankan setelah adanya penyatuan diantara Tiongkok dan Taiwan melalui kebijakan “Satu Negara Dua Sistem”. Kebijakan tersebut akan menghormati kedaulatan nasional, keamanan, kepentingan pembangunan, sistem sosial dan gaya hidup Taiwan. selain itu, properti pribadi, kepercayaan agama, dan hak-hak serta kepentingan dari rekan-rekan di Taiwan akan sepenuhnya dijamin oleh Tiongkok;
4. Tidak adanya batas waktu eksplisit untuk penyatuan namun isu Taiwan tidak boleh diturunkan dari generasi ke generasi;
5. Xi mengusulkan adanya pembentukan sebuah badan untuk melakukan konsultasi demokratis yang luas dan mendalam mengenai hubungan lintas selat dan masa depan bangsa serta membuat kelembagaan pengaturan kelembagaan untuk mempromosikan pembangunan damai terhadap hubungan Tiongkok dan Taiwan;
6. Xi menegaskan kembali sebuah prinsip yang ditinggalkannya dari bagian Taiwan dalam laporan yang dibuat oleh Xi kepada Kongres Partai ke-19 Partai Komunis Tiongkok pada November 2017: “Menempatkan harapan pada rakyat Taiwan.”;
7. Xi mengulangi kalimat dari pidato Jiang Zemin mengenai Taiwan pada tahun 1995 yaitu orang Tiongkok tidak akan berperang

melawan orang Tiongkok. Xi menegaskan bahwa tidak akan adanya penggunaan kekuatan terhadap Taiwan selama Taiwan dapat bekerjasama. Dalam artian, penggunaan militer akan dijadikan sebagai opsi terakhir oleh Tiongkok jika memang sangat diperlukan;

8. Xi menghidupkan kembali tujuan pelebagaan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan dan membangun pasar bersama lintas selat (Bush R. C., 2019).

Melalui pidato Xi pada tanggal 2 Januari 2019, Xi mengatakan kepada rakyat Taiwan untuk menerima reunifikasi dengan Taiwan yang bersifat harus dan akan terjadi. Berdasarkan delapan poin penting dalam pidato Xi diatas, ia secara jelas menegaskan mengenai *peaceful reunification* dibawah kebijakan “Satu Negara Dua Sistem” akan menguntungkan bagi Taiwan meskipun mereka harus berada di bawah kekuasaan Tiongkok, Taiwan akan diberikan konsesi berupa Daerah Administrasi Khusus yang akan menjamin Taiwan menikmati sistem pemerintahan dan otonomi yang luas dari pemerintahan Tiongkok. Taiwan akan memiliki kebebasan untuk menjalankan kehidupannya sendiri tanpa perlu terikat dengan peraturan di Tiongkok dengan diizinkan untuk memiliki sistem hukumnya sendiri serta hak-hak kebebasan lainnya seperti berkumpul dan mengemukakan pendapat (BBC News, 2019).

D. Ancaman Penggunaan Militer terhadap Taiwan

Taiwan merupakan bagian tak terisahkan dari wilayah Republik Rakyat Tiongkok meskipun Taiwan telah memiliki pemerintahan sendiri. Bahkan, tidak ada seorang pun dan tidak ada partai manapun yang dapat mengubah fakta bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Dibawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok

berusaha untuk mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan melalui *peaceful reunification*. Sehingga Xi mengambil langkah-langkah damai yang dapat membuat Taiwan kembali ke pelukan Negeri Tirai Bambu. Xi pernah mengatakan bahwa orang-orang Tiongkok tidak akan pernah melawan orang-orang Tiongkok dan Tiongkok bersedia menggunakan ketulusan terbesar serta bekerja keras untuk mengupayakan prospek reunifikasi secara damai. Pernyataan tersebut memiliki arti yaitu Tiongkok dan Taiwan merupakan satu bangsa yang sama yaitu berasal dari Satu Tiongkok, sehingga Tiongkok tidak akan melawan Taiwan dan lebih mengutamakan melakukan upaya yang damai.

Meskipun Tiongkok telah memilih untuk lebih menggunakan cara-cara yang damai, tidak menutup kemungkinan bagi Tiongkok untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Xi J pada *New Year Speech on Taiwan* tanggal 2 Januari 2019 bahwa: “*We do not promise to renounce the use of force and reserve the option to use all necessary measures.*” (Tang, 2019). Pernyataan tersebut bermakna penggunaan kekuatan militer tetap menjadi opsi terakhir bagi Tiongkok untuk mewujudkan reunifikasi dengan Pulau Formosa. Selama Taiwan dapat bekerjasama dengan baik bersama Tiongkok dalam mendorong terciptanya reunifikasi, maka cara-cara damai akan selalu diterapkan oleh Tiongkok. Sebaliknya, jika Taiwan tetap tidak dapat diajak kerjasama dengan baik, maka penggunaan kekuatan militer untuk menyerang Taiwan akan selalu siap dilakukan oleh Negeri Tirai Bambu untuk membuat Taiwan dapat bersatu kembali dengannya.

Opsi penggunaan kekuatan militer ini merupakan bagian dari ancaman bagi Taiwan bahwa Tiongkok tidak akan segan untuk menyerang wilayah tersebut ketika segala opsi damai sudah tidak dapat digunakan untuk

mewujudkan reunifikasi. Bahkan bukan hanya bagi Taiwan, siapa pun yang berusaha untuk memisahkan Taiwan dari Tiongkok akan diserang demi melindungi persatuan nasional yang sudah sejak lama diimpikan oleh Tiongkok. Rencana penggunaan kekuatan militer untuk menyerang Taiwan bukan hanya sebuah perkataan semata karena Tiongkok sudah mulai menyiapkan alat-alat militer dan pasukannya yang kapan pun siap digunakan. Tiongkok juga telah kembali melakukan pelatihan militer secara besar-besaran di wilayah luas perairan dan udara di Laut Tiongkok Selatan dan Timur yang dekat dengan Taiwan (John, 2019).